

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

ASEAN merupakan singkatan dari *Association of Southeast Asian Nations*. Dikenal juga dengan nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN memiliki tujuan menyejahterakan dan memajukan negara-negara di Asia Tenggara. Sampai saat ini, sudah tergabung 11 negara yang berada di bawah ASEAN. Adapun kesebelas negara tersebut, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Timor Leste, Singapura, dan Vietnam (ASEAN, 2025). Kebijakan pajak di negara-negara ASEAN menunjukkan variasi yang mencerminkan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing negara. Brunei Darussalam tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi dan menetapkan tarif pajak badan sebesar 18,5%, dengan ketergantungan tinggi pada pendapatan minyak dan gas (Medina, 2022). Filipina berupaya menerapkan pajak karbon sebagai salah satu upaya memperbaiki sistem perpajakan negara. Adapun Filipina menerapkan tarif pajak badan 25% dan PPN 12%, serta menjalankan reformasi melalui *Tax Reform for Acceleration and Inclusion* (TRAIN) untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan (Acclime, 2025). Kamboja mengenakan pajak badan 20% dan PPN 10%, dengan fokus pada peningkatan kepatuhan dan efisiensi administrasi (Acclime Cambodia, 2022). Indonesia sendiri memberlakukan pajak dengan *self-assessment system*, artinya wajib pajak melakukan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya ke DJP. Dalam hal pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha (PPh Badan), Indonesia menetapkan tarif sebesar 22%. Sedangkan, Indonesia menetapkan tarif PPN sebesar 11% sejak 1 April 2022. Adapun kedua kebijakan merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta mengadopsi teknologi informasi untuk mendukung reformasi perpajakan (Pramudya, 2022). Laos

memberlakukan tarif pajak badan 24% dan PPN 10%, dengan prioritas pada penguatan sistem administrasi. Myanmar menetapkan tarif sebesar 25% untuk PPh Badan. Myanmar tidak memiliki tarif PPN, melainkan *commercial tax*. Tarif *commercial tax* di Myanmar yaitu 0% hingga 8%. *Commercial tax* ini dibebankan dan dipungut sebagai pajak keluaran yang harus dibayarkan pada otoritas pajak Myanmar (DFDL, 2025). Malaysia sendiri menetapkan tarif sebesar 33% untuk PPh Badan dan tarif sebesar 10% untuk PPN. dengan fokus pada diversifikasi pendapatan dan peningkatan kepatuhan melalui program pengungkapan sukarela. Thailand menetapkan tarif pajak badan 20% dan PPN 7%, serta memberikan insentif pajak untuk sektor tertentu guna mendorong investasi. Timor Leste memiliki sistem perpajakan yang sedang berkembang dengan tarif pajak badan 10% dan PPN 2%, dan fokus pada peningkatan kapasitas fiskal. Singapura, dengan tarif pajak badan 17% dan PPN 7%, mengedepankan kebijakan fiskal yang kompetitif untuk menarik investasi. Sementara itu Vietnam menetapkan tarif sebesar 15-17% untuk PPh Badan dan tarif sebesar 10% untuk PPN. dengan kemajuan dalam digitalisasi dan reformasi untuk meningkatkan transparansi dan Realisasi penerimaan pajak (Ulfiana, 2023)

Realisasi penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, dan stabilitas politik. Realisasi penerimaan pajak yang baik dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan ekonomi (Rahayu, Evana, & Prasetyo, 2023; Syadullah & Wibowo, 2015). Fenomena Realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan yang beragam, di mana terdapat perbedaan dalam tarif pajak, jenis pajak yang dikenakan, dan mekanisme pengumpulan. Tingkat efisiensi administrasi pajak di kawasan ini juga bervariasi, dengan Singapura dikenal memiliki sistem yang sangat efisien, memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, sementara Indonesia menghadapi tantangan besar akibat administrasi yang kompleks dan birokrasi yang lambat, yang dapat menghambat kepatuhan. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB di negara-negara ASEAN cenderung rendah, dengan Indonesia berada di posisi ketujuh, menunjukkan adanya masalah dalam pemungutan pajak dan kepatuhan, sedangkan

Muhamad Herdyansyah, 2025

PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

negara-negara seperti Vietnam dan Thailand memiliki rasio pajak yang lebih tinggi, mencerminkan tingkat kepatuhan yang lebih baik (Setyowati, 2014)

Realisasi penerimaan pajak dalam penelitian ini diukur melalui indikator *tax ratio*, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). *Tax ratio* yang tinggi dapat mencerminkan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. *Tax ratio* dianggap sebagai indikator makro yang umum digunakan untuk mencerminkan tingkat efektivitas pemungutan pajak dan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Realisasi penerimaan pajak sebagai variabel dependen mendapatkan dukungan kuat dari berbagai studi, Prasetyanti dkk. (2023) menemukan bahwa kualitas regulasi dan *e-government* berkontribusi signifikan terhadap Realisasi penerimaan pajak di ASEAN. Deden Tarmidi dkk. (2019) menambahkan bahwa adopsi teknologi informasi di ASEAN secara umum mendukung peningkatan Realisasi penerimaan pajak. Studi Hartani dkk. (2020) mengungkapkan bahwa penggunaan *e-government* dan Teknologi informasi juga dapat menurunkan korupsi, yang merupakan faktor tidak langsung yang berkontribusi pada peningkatan Realisasi penerimaan pajak.

Tabel 1. 1 Perbandingan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di Negara-negara ASEAN selama 2021-2023

Tahun	KHM	IDN	LAO	MYS	PHL	SGP	THA	VNM
2021	16,37	9,12	10,25	11,24	14,13	13,12	16,23	13,92
2022	13,50	10,39	10,62	11,68	14,62	11,45	15,14	12,81
2023	14,11	10,21	12,99	12,53	14,10	13,39	15,45	11,60
RATA-RATA	14,66	9,90	11,29	11,82	14,28	12,65	15,61	12,78

Sumber : *Government Revenue Dataset* diolah kembali oleh penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN selama periode 2021 hingga 2023 menunjukkan variasi yang signifikan. Indonesia menjadi negara dengan realisasi penerimaan pajak terendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2021, Indonesia mencatatkan penerimaan pajak sebesar 9,12%, mengalami peningkatan menjadi 10,39% pada tahun 2022, namun kembali menurun menjadi 10,21% pada tahun 2023. Rata-rata

realisasi pajak selama tiga tahun sebesar 9,90%, menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas kebijakan pajak, kepatuhan, serta manajemen administrasi perpajakan. Kamboja justru menjadi salah satu negara dengan realisasi penerimaan pajak yang cukup tinggi. Pada tahun 2021, Kamboja mencatatkan penerimaan pajak sebesar 16,37%, turun menjadi 13,50% pada 2022, kemudian naik kembali menjadi 14,11% di 2023. Dengan rata-rata 14,66%, menunjukkan fluktuasi yang signifikan dan adanya dinamika dalam pengelolaan perpajakan. Laos memperlihatkan tren peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada 2021, Laos merealisasikan 10,25%, sedikit naik menjadi 10,62% di 2022, dan meningkat signifikan menjadi 12,99% di 2023. Rata-rata 11,29%, menandakan adanya perbaikan dalam sistem penerimaan pajak Laos. Malaysia menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2021, Malaysia mencatatkan penerimaan pajak 11,24%, naik menjadi 11,68% pada 2022, dan meningkat menjadi 12,53% di 2023. Rata-rata 11,82%, mencerminkan penguatan pengelolaan perpajakan nasional. Filipina mencatatkan tren stabil, meskipun sedikit menurun. Di tahun 2021, realisasi pajak sebesar 14,13%, naik menjadi 14,62% di 2022, namun sedikit turun ke 14,10% di 2023. Rata-rata 14,28%, menunjukkan performa yang relatif konsisten di atas rata-rata kawasan. Singapura mengalami fluktuasi moderat. Penerimaan pajak tahun 2021 sebesar 13,12%, turun menjadi 11,45% di 2022, dan naik kembali menjadi 13,39% pada 2023. Dengan rata-rata 12,65%, dinamika ini mengindikasikan pengaruh faktor eksternal terhadap basis perpajakan Singapura. Thailand memperlihatkan tren penurunan. Tahun 2021 mencatatkan 16,23%, menurun menjadi 15,14% di 2022, dan kembali turun menjadi 15,45% di 2023. Rata-rata 15,61%, masih menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan, namun dengan potensi tantangan dalam mempertahankan tren positif. Vietnam mengalami fluktuasi turun. Di 2021, realisasi 13,92%, turun ke 12,81% di 2022, dan kembali turun ke 11,60% di 2023. Dengan rata-rata 12,78%, Vietnam menunjukkan potensi tekanan dalam pengumpulan pajak selama tiga tahun terakhir.

Dalam era digital, efektivitas kualitas regulasi tidak hanya diukur dari kepastian hukum dan penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuannya dalam

mengakomodasi transformasi digital, termasuk integrasi teknologi informasi dalam sistem perpajakan. Kualitas regulasi merupakan salah satu dimensi utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan secara signifikan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan publik, termasuk perpajakan (Kaufmann & Kraay, 2024). Dalam penelitian ini, variabel kualitas regulasi mempresentasikan sejauh mana kebijakan dan peraturan perpajakan di suatu negara didesain dan diimplementasikan secara transparan, dapat diprediksi, serta mendukung kepastian hukum bagi wajib pajak. Untuk mengukur kualitas regulasi, digunakan indikator *Regulatory Quality* yang bersumber dari *World Governance Indicators*. Kualitas regulasi mencerminkan persepsi tentang kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan dan regulasi yang baik yang mendukung dan mendorong perkembangan sektor swasta (World Bank, 2024). Berikut ini disajikan perbandingan skor kualitas regulasi setiap negara ASEAN dalam rentang tahun 2021 sampai tahun 2023 berdasarkan *World Governance Indicators* (WGI):

Tabel 1. 2 Skor Regulasi berdasarkan *World Governance Indicators* (WGI)
ASEAN Tahun 2021-2023

Tahun	KHM	IDN	LAO	MYS	PHL	SGP	THA	VNM
2021	-0.69	0.29	-0.91	0.71	0.06	2.23	0.08	-0.40
2022	-0.71	0.21	-0.99	0.64	0.06	2.21	0.17	-0.43
2023	-0.68	0.30	-0.93	0.66	0.16	2.31	0.16	-0.38
Rata-rata	-0.69	0.26	-0.94	0.67	0.10	2.25	0.14	-0.41

Sumber : *Statistical Performance Indicators*, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2, kualitas regulasi di negara-negara ASEAN selama periode 2021 hingga 2023 menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar negara. Singapura secara konsisten menjadi negara dengan kualitas regulasi tertinggi di kawasan. Pada tahun 2021, Singapura mencatatkan skor 2,23, sedikit menurun menjadi 2,21 pada tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 2,31 pada tahun 2023. Dengan rata-rata skor 2,25, Singapura menunjukkan tata kelola regulasi yang sangat kuat dan stabil, yang berpotensi mendorong peningkatan realisasi

Muhamad Herdyansyah, 2025

PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penerimaan pajak secara signifikan. Malaysia menempati posisi kedua dengan rata-rata skor kualitas regulasi sebesar 0,67. Pada tahun 2021, Malaysia mencatatkan skor 0,71, mengalami sedikit penurunan menjadi 0,64 pada tahun 2022, dan kembali naik ke 0,66 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia memiliki sistem regulasi yang cukup baik dan relatif stabil dalam tiga tahun terakhir. Indonesia berada di posisi ketiga dengan rata-rata skor 0,26. Pada tahun 2021, Indonesia mencatatkan skor 0,29, sedikit menurun menjadi 0,21 pada tahun 2022, namun meningkat kembali menjadi 0,30 pada tahun 2023. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam kualitas regulasi, meskipun masih berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan Singapura dan Malaysia. Filipina dan Thailand menunjukkan kualitas regulasi yang relatif lemah dibandingkan negara-negara sebelumnya. Filipina mencatatkan skor 0,06 pada tahun 2021 dan 2022, lalu mengalami peningkatan menjadi 0,16 pada tahun 2023, dengan rata-rata 0,10. Sementara itu, Thailand mencatatkan skor 0,08 pada tahun 2021, meningkat menjadi 0,17 pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 0,16 pada tahun 2023, dengan rata-rata 0,14. Kedua negara ini menunjukkan perbaikan yang lambat dan masih perlu memperkuat kerangka regulasi mereka. Kamboja, Laos, dan Vietnam mencatatkan kualitas regulasi yang negatif selama periode pengamatan, menandakan tata kelola regulasi yang lemah. Kamboja memiliki rata-rata skor -0,69, dengan skor -0,69 pada tahun 2021, -0,71 pada tahun 2022, dan -0,68 pada tahun 2023. Laos mencatatkan kualitas regulasi terendah di kawasan, dengan skor -0,91 pada tahun 2021, turun menjadi -0,99 pada tahun 2022, dan sedikit membaik menjadi -0,93 pada tahun 2023, dengan rata-rata -0,94. Vietnam juga mengalami kualitas regulasi yang rendah, dengan skor -0,40 pada tahun 2021, -0,43 pada tahun 2022, dan -0,38 pada tahun 2023, serta rata-rata -0,41.

Syadullah & Wibowo (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa kualitas regulasi berdampak positif terhadap rasio pajak. Kemampuan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung sektor swasta mendorong produktivitas ekonomi dan penerimaan pajak. Namun, beban regulasi yang berat dapat memperluas sektor informal dan menurunkan kinerja ekonomi jika tidak dikendalikan. Studi yang dilakukan Rahayu, dkk (2023) menunjukkan bahwa

Muhamad Herdyansyah, 2025

PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Regulasi yang kuat dan jelas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan serta meningkatkan kepercayaan investor dan efisiensi ekonomi. Penelitian yang dilakukan Marselina (2019) menunjukkan bahwa kualitas regulasi memiliki dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun menurut Prasetyanti dkk (2023) ditemukan bahwa kualitas regulasi tidak memiliki pengaruh terhadap rasio penerimaan pajak.

Menurut Prestianawati & Setyani (2023) Kemapanan Infrastruktur meliputi pengembangan infrastruktur seperti transportasi, energi, dan komunikasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan efisiensi bisnis. Kemapanan infrastruktur menekankan mengenai seberapa terjangkau dan stabilnya infrastruktur, termasuk akses internet dan layanan publik. Infrastruktur yang baik penting untuk adopsi penggunaan teknologi informasi. Misalnya, ketersediaan internet yang cepat dan stabil berguna untuk banyak orang menggunakan *platform* pajak digital yang otomatis serta dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kemapanan infrastruktur dipengaruhi oleh faktor investasi pemerintah dan kapasitas institusi publik dalam membangun serta mengelola sistem informasi. Ketersediaan dana publik untuk pengembangan sistem informasi perpajakan, jaringan digital nasional dan pusat data nasional merupakan faktor utama. Kemapanan infrastruktur menjadi fondasi utama dalam penerapan sistem pajak digital. Infrastruktur yang belum merata akan berdampak pada kesenjangan akses antara wajib pajak perkotaan dan pedesaan. Tanpa infrastruktur yang andal dan merata, maka penggunaan teknologi informasi dalam sistem perpajakan akan menjadi tidak inklusif dan berisiko menurunkan penerimaan pajak. Kemapanan infrastruktur mengacu pada kesiapan infrastruktur data dan informasi di suatu negara yang dapat menunjang transformasi digital di bidang perpajakan. Dalam penelitian ini, kemapanan infrastruktur diukur menggunakan skor Pilar 5: Data *Infrastructure* pada *Statistical Performance Indicators* (SPI) yang dirilis oleh *World Bank*. Pilar ini menilai kesiapan infrastruktur data suatu negara, termasuk peraturan, tata kelola, standar, keterampilan sumber daya manusia, kemitraan, dan dukungan keuangan yang diperlukan untuk menyediakan data yang berkualitas dan bermanfaat. Semakin tinggi skor Pilar Data *Infrastructure*, semakin menunjukkan

Muhamad Herdyansyah, 2025

PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bahwa negara tersebut memiliki sistem pendukung yang baik dalam pengelolaan data, termasuk administrasi perpajakan, yang berpotensi mendorong peningkatan penerimaan pajak. Berikut disajikan tabel Skor pilar infrastruktur di negara-negara ASEAN selama tahun 2021-2023 dari *Statistical Performance Indicators* (SPI):

Tabel 1. 3 Persentil Pilar Infrastruktur berdasarkan *Statistical Performance Indicators* (SPI) di negara-negara ASEAN selama 2021-2023

Tahun	KHM	IDN	LAO	MYS	PHL	SGP	THA	VNM
2021	55	60	40	55	55	75	75	40
2022	55	60	40	55	55	80	85	40
2023	55	70	35	75	65	80	85	50
Rata-rata	55.00	63.33	38.33	61.67	58.33	78.33	81.67	43.33

Sumber : *Statistical Performance Indicators*, 2025

Berdasarkan skor keamanan infrastruktur dari *Statistical Performance Indicators* (SPI) periode 2021 hingga 2023 pada Tabel 1.3, terlihat bahwa terdapat kesenjangan yang cukup mencolok dalam tingkat keamanan infrastruktur antar negara ASEAN. Thailand menempati posisi teratas dengan rata-rata skor 81,67, mencatatkan skor sebesar 75 pada tahun 2021, meningkat menjadi 85 pada tahun 2022 dan stabil di angka 85 pada tahun 2023. Singapura berada di posisi kedua dengan rata-rata skor 78,33, di mana pada tahun 2021 mencatatkan skor 75, lalu meningkat menjadi 80 pada tahun 2022 dan tetap stabil pada angka 80 di tahun 2023. Tingginya skor Thailand dan Singapura mencerminkan keamanan infrastruktur yang sangat baik, yang menjadi pondasi kuat dalam mendukung digitalisasi dan efektivitas administrasi perpajakan. Indonesia dan Malaysia menunjukkan tingkat keamanan infrastruktur yang cukup baik. Indonesia memiliki rata-rata skor 63,33, dengan skor masing-masing 60 pada tahun 2021 dan 2022, kemudian meningkat signifikan menjadi 70 pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan adanya penguatan sistem pendukung infrastruktur digital di Indonesia. Malaysia mencatatkan rata-rata skor 61,67, dengan skor 55 pada tahun 2021 dan 2022, lalu meningkat menjadi 75 pada tahun 2023, menunjukkan adanya perkembangan pesat dalam kesiapan infrastrukturnya. Filipina berada pada posisi

Muhamad Herdyansyah, 2025

PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menengah dengan rata-rata skor 58,33, yang menunjukkan kestabilan selama tiga tahun berturut-turut dengan skor 55 di tahun 2021 dan 2022, serta 65 di tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa Filipina memiliki infrastruktur yang cukup memadai, meski belum menunjukkan lonjakan signifikan dalam pengembangannya. Kamboja dan Vietnam masih menghadapi tantangan dalam membangun infrastruktur yang kuat. Kamboja mencatatkan skor stabil sebesar 55 selama tiga tahun berturut-turut dengan rata-rata yang sama, yaitu 55,00. Vietnam memiliki rata-rata skor 43,33, dengan skor 40 pada tahun 2021 dan 2022, serta sedikit meningkat menjadi 50 pada tahun 2023, menunjukkan bahwa kesiapan infrastrukturnya masih tergolong rendah. Laos menjadi negara dengan kemampuan infrastruktur terendah, dengan rata-rata skor 38,33. Laos mencatatkan skor 40 pada tahun 2021 dan 2022, namun justru menurun menjadi 35 pada tahun 2023. Hal ini menandakan keterbatasan serius dalam kesiapan infrastruktur Laos, yang dapat menjadi kendala dalam mengembangkan sistem perpajakan berbasis digital yang efektif.

Ramadhani & Faridatussalam (2024) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Infrastruktur telekomunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 negara ASEAN tahun 2013-2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa memperlihatkan infrastruktur telekomunikasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena akan meningkatkan akses masyarakat dan pelaku bisnis terhadap informasi yang lebih baik, yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis domestik dan asing serta mengubahnya menjadi kegiatan produktif dalam meningkatkan perekonomian bangsa. Studi lainnya yang dilakukan oleh Taufik & Markhamah (2024) menunjukkan bahwa infrastruktur mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Kemampuan Infrastruktur, khususnya infrastruktur teknologi informasi, menjadi landasan penting bagi penerapan sistem perpajakan digital. Penelitian oleh Mallick (2020) menguji pengaruh infrastruktur Teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan terhadap mobilisasi pendapatan pajak di India dan menemukan bahwa meskipun infrastruktur Teknologi informasi tidak berdampak signifikan pada penerimaan pajak, kualitas tata kelola tetap menjadi faktor utama. Relevansi infrastruktur juga didukung oleh Oliver dkk. (2017) yang menegaskan hubungan positif antara

Muhamad Herdyansyah, 2025

PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAMPUAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendapatan pajak dan pembangunan infrastruktur, meskipun tantangan seperti korupsi dapat menghambat efektivitasnya. Hal ini menegaskan pentingnya kemapanan infrastruktur yang didukung tata kelola yang baik dalam mendukung sistem perpajakan yang efektif.

Berdasarkan perkembangan teknologi informasi di negara-negara ASEAN, terlihat adanya perbedaan tingkat adopsi dan penggunaan teknologi informasi yang signifikan di setiap negara. Penggunaan Teknologi Informasi saat ini diukur secara menyeluruh dengan beberapa indikator utama yang telah distandarkan secara internasional oleh *International Telecommunication Union* (ITU, 2025). Tiga indikator yang paling banyak dijadikan acuan adalah persentase individu yang menggunakan internet (*Individuals using the internet, % of population*), kapasitas *bandwidth* internet internasional per pengguna (*international internet bandwidth per user*), dan proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet di rumah (*households with internet access at home*). Ketiga indikator ini dimanfaatkan untuk memahami bagaimana penetrasi, kapasitas, serta pemerataan akses Teknologi Informasi di berbagai lapisan masyarakat. Menurut *World Bank* (2025) Pengukuran *individuals using the internet (% of population)* memberikan gambaran tentang tingkat adopsi internet di masyarakat, yaitu seberapa besar proporsi penduduk yang telah memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, indikator *international internet bandwidth per user* menilai kapasitas dan kualitas konektivitas internasional yang tersedia untuk setiap pengguna, penting untuk memastikan bahwa akses internet tidak hanya tersedia namun juga berkualitas. Sedangkan *households with internet access at home* mencerminkan cakupan akses teknologi informasi pada tingkat rumah tangga, yang sangat penting karena rumah menjadi salah satu titik utama penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, maupun hiburan. Memanfaatkan data yang dirilis oleh ITU, indikator-indikator ini telah digunakan sebagai bagian dari kerangka pengukuran global untuk menilai kemajuan serta tantangan dalam pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi di berbagai negara. Pendekatan ini tidak hanya membantu memahami tingkat keterjangkauan dan pemerataan teknologi di

masyarakat, tetapi juga penting untuk perumusan kebijakan pembangunan berbasis data dan *evidence-based policy* making pada era digital saat ini. Berikut ini akan disajikan skor rata-rata teknologi berdasarkan *International Telecommunication Union* (ITU) di negara-negara ASEAN tahun 2021-2023 :

Tabel 1. 4 Rata-rata persentase Indikator ITU *World Bank* Negara ASEAN Tahun 2021-2023

Tahun	KHM	IDN	LAO	MYS	PHL	SGP	THA	VNM
2021	56,07	68,37	62,61	86,72	61,14	97,18	78,79	73,64
2022	58,63	71,63	64,32	85,35	66,55	95,96	79,71	75,03
2023	61,17	72,41	64,65	87,51	70,68	96,02	81,18	77,18
Rata-rata	58,62	70,80	63,86	86,53	66,12	96,39	79,89	75,28

Sumber : *International Telecommunication Union World Bank*, 2025

Berdasarkan data penggunaan teknologi informasi yang diukur melalui indikator dari *International Telecommunication Union* (ITU) pada Tabel 1.4, terlihat adanya variasi dan kesenjangan signifikan dalam tingkat adopsi teknologi informasi di negara-negara ASEAN selama periode 2021 hingga 2023. Data ini merupakan rata-rata dari tiga indikator utama, yaitu persentase penduduk yang menggunakan internet (*individuals using the internet*), kapasitas bandwidth internasional per pengguna (*international internet bandwidth per user*), dan persentase rumah tangga yang memiliki akses internet di rumah (*households with internet access at home*). Singapura secara konsisten menempati posisi tertinggi dengan rata-rata 96,39, mencatat 97,18 pada tahun 2021, sedikit menurun menjadi 95,96 pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 96,02 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan kesiapan digital yang sangat baik, serta penetrasi dan kualitas akses internet yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Malaysia mencatat angka yang tinggi dengan rata-rata 86,53, sebesar 86,72 pada tahun 2021, sedikit menurun menjadi 85,35 pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 87,51 di tahun 2023. Kondisi ini menggambarkan ekosistem digital Malaysia yang kuat dan stabil. Thailand berada di posisi ketiga dengan rata-rata 79,89, mengalami peningkatan dari 78,79 pada tahun 2021, 79,71 pada tahun 2022, hingga 81,18 pada tahun 2023.

Muhamad Herdyansyah, 2025

PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Ini menandakan bahwa Thailand secara aktif memperluas infrastruktur dan aksesibilitas digital. Vietnam menunjukkan perkembangan positif dengan rata-rata 75,28, meningkat dari 73,64 di tahun 2021, 75,03 di tahun 2022, dan 77,18 di tahun 2023. Kenaikan ini merefleksikan percepatan transformasi digital dan peningkatan akses internet di Vietnam. Indonesia mencatat rata-rata 70,80, dengan angka 68,37 di tahun 2021, meningkat menjadi 71,63 di tahun 2022, dan 72,41 di tahun 2023. Meskipun masih di peringkat menengah, tren positif ini menunjukkan pertumbuhan adopsi teknologi digital yang berkelanjutan. Laos memiliki rata-rata 63,86, dengan tren naik dari 62,61 di tahun 2021, 64,32 di tahun 2022, hingga 64,65 di tahun 2023. Walaupun laju pertumbuhannya cukup moderat, Laos menunjukkan konsistensi dalam peningkatan penggunaan teknologi informasi. Filipina mencatat rata-rata 66,12, mengalami kenaikan dari 61,14 di tahun 2021, 66,55 di tahun 2022, dan 70,68 di tahun 2023. Peningkatan signifikan ini menunjukkan adanya dorongan kuat terhadap transformasi digital di Filipina. Kamboja menempati posisi terendah dengan rata-rata 58,62, sebesar 56,07 di tahun 2021, naik menjadi 58,63 di tahun 2022, dan 61,17 di tahun 2023. Walaupun masih di bawah rata-rata ASEAN, tren kenaikan ini menandakan adanya perbaikan bertahap dalam pengembangan infrastruktur dan akses internet.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh teknologi informasi dalam sistem perpajakan dan ekonomi. Yunita (2025) menemukan bahwa ekonomi digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT) berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN+3, dengan meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, serta menekan biaya produksi. Namun, Akbar dan Apollo (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi belum berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun informasi perpajakan sudah mudah diakses. Hal ini menunjukkan masih ada tantangan dalam mendorong penggunaan teknologi secara efektif dalam administrasi perpajakan. Perbedaan temuan ini menguatkan pentingnya mengkaji pengaruh kualitas regulasi, kemapanan infrastruktur, dan penggunaan teknologi informasi secara komprehensif terhadap realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN.

Muhamad Herdyansyah, 2025

PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan yang memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan kebijakan perpajakan di kawasan ASEAN. Dari sisi pengetahuan, penelitian ini mengintegrasikan kualitas regulasi, keamanan infrastruktur, dan penggunaan teknologi informasi sebagai faktor yang memengaruhi Realisasi penerimaan pajak. Pendekatan ini masih jarang ditemukan dalam literatur sebelumnya. Kebaruan bukti empiris, data empiris dari ASEAN terkait hubungan antara regulasi perpajakan, keamanan infrastruktur dan penggunaan teknologi informasi dapat memengaruhi Realisasi penerimaan pajak masih belum banyak tersedia, sehingga dapat memberikan bukti empiris baru dan aktual dalam mendukung reformasi perpajakan berbasis teknologi di negara-negara ASEAN.

Urgensi dari penelitian ini karena di kawasan ASEAN, tantangan dalam Realisasi penerimaan pajak semakin kompleks akibat perkembangan ekonomi digital. Negara-negara ASEAN menghadapi kesenjangan dalam kesiapan sistem perpajakan digital, menjadikan penelitian ini krusial untuk memberikan bukti empiris yang dapat mendukung kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adaptif di kawasan tersebut. Penelitian ini layak karena memberikan kontribusi teoritis dalam menghubungkan regulasi, infrastruktur, dan teknologi informasi dalam konteks Realisasi penerimaan pajak yang masih kurang dieksplorasi. Secara praktis, hasil penelitian dapat membantu pembuat kebijakan merumuskan regulasi yang lebih efisien, serta memperkuat infrastruktur digital di ASEAN guna meningkatkan Realisasi penerimaan pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti topik ini dengan mengangkat judul **“Pengaruh Kualitas Regulasi, Keamanan Infrastruktur dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Negara-negara ASEAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kualitas regulasi terhadap Realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN?

2. Bagaimana pengaruh keamanan infrastruktur terhadap Realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN?
3. Bagaimana pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap Realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN?
4. Bagaimana pengaruh kualitas regulasi, keamanan infrastruktur, dan penggunaan teknologi informasi terhadap Realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas regulasi terhadap Realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN
2. Untuk menganalisis pengaruh keamanan infrastruktur terhadap Realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN
3. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap Realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN.
4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas regulasi, keamanan infrastruktur, dan penggunaan teknologi informasi terhadap Realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan setelah adanya pengujian secara empiris melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai pengaruh antara kualitas regulasi, keamanan infrastruktur, dan penggunaan teknologi informasi terhadap realisasi penerimaan pajak. Serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji pengaruh antara kualitas regulasi, keamanan infrastruktur, dan penggunaan teknologi informasi terhadap realisasi penerimaan pajak.

Muhamad Herdyansyah, 2025

PENGARUH KUALITAS REGULASI, KEMAPANAN INFRASTRUKTUR, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASEAN
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan otoritas pajak di negara-negara ASEAN dalam merumuskan kebijakan yang memperkuat kualitas regulasi, kemapanan infrastruktur, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Serta mampu memberikan wawasan kepada masyarakat dan wajib pajak mengenai pentingnya penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan untuk menciptakan sistem yang transparan, cepat, dan akuntabel.